

## **ABSTRAK**

### **PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021)**

**Oleh**

**Annisa Nur Azizah Fajri**

Salah satu objek pengawasan KPPU adalah hubungan kemitraan. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021 menetapkan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa terhadap Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu. Penelitian ini akan mengkaji peran KPPU sebagai pengawas dalam menangani perkara tersebut serta pertimbangan majelis komisi dalam memutus perkara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan juga wawancara sebagai data pendukung. Selanjutnya, data diolah dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil pengawasan kemitraan yang dilakukan KPPU dalam penanganan perkara kemitraan PT Suryabumi Tunggal Perkasa telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Perkom No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Majelis Komisi dalam pertimbangannya memutuskan bahwa PT Suryabumi Tunggal Perkasa terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu melakukan penguasaan dalam penentuan hak dan kewajiban. Oleh karena itu PT Suryabumi Tunggal Perkasa dijatuhi sanksi berupa perintah untuk memenuhi kewajibannya dan menyempurnakan mekanisme terkait transparansi laporan keuangan serta evaluasi pelaksanaannya yang melibatkan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu.

**Kata Kunci: *Kemitraan, KPPU, UMKM.***

## **ABSTRACT**

### **ROLE OF COMMISSION OF OVERVIEW OF BUSINESS PROPERTY AS SUPERVISOR IN THE IMPLEMENTATION OF SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES PARTNERSHIPS (KPPU Decision Number: 03/KPPU-K/2021)**

**By**

**Annisa Nur Azizah Fajri**

*One of the objects of KPPU supervision is the partnership relationship. KPPU Decision Number: 03/KPPU-K/2021 stipulates the alleged violation of partnership implementation committed by PT Suryabumi Tunggal Perkasa against Tri Hampang Bersatu Plantation Cooperative. This research will examine the role of KPPU as a supervisor in handling the case and the considerations of the commission panel in deciding the case.*

*This research is a normative legal research with descriptive type and the problem approach used is statutory approach and case approach. The data used is secondary data collected through literature study, document study, and also interviews as supporting data. Furthermore, the data is processed by data examination, data classification and data systematization and analyzed qualitatively.*

*The results of partnership supervision conducted by KPPU in handling the partnership case of PT Suryabumi Tunggal Perkasa have been carried out properly as stipulated in Perkom No. 2 of 2024 concerning Procedures for Supervision and Handling of Partnership Cases. The Commission Panel in its consideration decided that PT Suryabumi Tunggal Perkasa was proven to have fulfilled the elements of a violation of partnership relations as stipulated in Article 35 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2008 concerning UMKM, namely exercising control in determining rights and obligations. Therefore, PT Suryabumi Tunggal Perkasa was sanctioned in the form of an order to fulfill its obligations and to perfect its partnership mechanism related to financial report transparency and evaluation of its implementation involving Tri Hampang Bersatu Plantation Cooperative.*

**Keywords: KPPU, Partnership, UMKM.**